

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 1997. *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind Hill-Co. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press. Jakarta.
- Budhijanto, Danrivanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016*. Reflika Aditama. Bandung.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Rusell Sage Foundation. New York.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Diterjemahkan dari Lawrence M Friedman, The Legal System A Social Science Perspective*. Genta Nusa Media. Bandung.
- Friedmann, W. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum Susunan I*. Raja Gafindo. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2015. *Hukum Kontrak Buku Kesatu*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hadjon, Philipus M dkk. 2016. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2020. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada Press. Yogyakarta.

- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana. Jakarta.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo. Jakarta.
- HS, Salim. 2006. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- M Manullang, E Fernando. 2019. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Marbun, SF. dan Mahfud MD, Moh. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Marbun, SF. 2015. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Marbun, SF. 2018. *Hukum Administrasi Negara I*. UII Press. Yogyakarta.
- Margono, H. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Teori Hukum*. CV Maha Karya Pustaka. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nonet, Phillippe. 2020. *Hukum Responsif*. Nusa Media. Bandung.
- Ottomidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Griya Media. Salatiga.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. CV Mandar Maju. Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. 2018. *Perbuatan Melanggar Hukum*. CV Mandar Maju. Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Remmelink, Jan. 2014. *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Padannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Ridwan. 2016. *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Perkara Korupsi*. FH UII PRESS. Yogyakarta.

Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya. Cetakan ke 3*. PT Alumni. Bandung.

Satrio, J. 2012. *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Simanjuntak, Ricardo. 2018. *Hukum Perjanjian, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Kontan. Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.

Soemadipradja, S.S. Rahmad. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. National Legal Reform Program. Jakarta.

Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.

Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta.

Sumardjono, Maria SW. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Tanpa penerbit. Yogyakarta.

Tjandra, W. Riawan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

Wiradipradja, E. Saefullah. 2016. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Ikapi. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Burgelijk Wetboek Voor Indonesie,
(Staatsblad Tahun 1847, Nomor 23)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847:23 sebagaimana yang telah
beberapa kali diubah dan ditambah. terakhir dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas
Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23)
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2959)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 Tentang Pencabutan Regeling PO DE
STAAT VAN OORLOG EN BELEG dan Penetapan Keadaan Bahaya

Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk
Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang
Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan berlakunya Ketentuan
Perundang-undangan Pidana Kejahatan Terhadap Penerbangan dan
Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara
Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit. Lembaran Negara
No. 20. Tambahan Lembaran Negara No. 3273.

The Vienna Convention On Contracts For The Internationals Sale Of Good 1980.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999. Tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara
No. 75. Tambahan Lembaran Negara No. 3871.

Undang-Undang No. 24. Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Lembaran Negara No. 66. Tambahan Lembaran Negara No. 4723.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas No.5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara No. 160.
Tambahan Lembaran Negara No. 5079.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara No. 82. Tambahan Lembaran Negara No. 5234.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara No. 292. Tambahan Lembaran Negara No. 5601.

International Institute for the Unification of Private Law, 2016. *Principles of International Commercial Contracts*, Rome, UPICC

Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara No. 245. Tambahan Lembaran Negara No. 6573.

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1960 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peralihan yang tersebut Pada Pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959.

Peraturan Menteri Pertanian No. 30/Permentan/PD.620/5/2009 tentang Pelarangan Pemasukan Hewan Babi dan Produknya ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2006 Tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza)

Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Ke Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah keadaan Tertentu

PERKAPOLRI No. POL C Tahun 2007 tentang Peran Polri dalam Penanggulangan Terhadap Flu Burung.

Peraturan Walikota Sorong No. 42 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Serta Pemeliharaan Unggas dalam Rangka Pengendalian Penyakit *Avian Influenza* (Flu Burung)

Keputusan Presiden No. 12. Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease atau Covid 2019 sebagai Bencana Nasional. SK No 01A740 A

Keputusan Menteri Pertanian No : 1096/Kpts/TN.120/10/1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya ke Wilayah Daerah Rabies di Indonesia

Keputusan Menteri Pertanian No. 473/Kpts/TN.150/8/2002 tentang Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) serta Program Pembebasannya

Keputusan Menteri Pertanian No. 444/Kots/TN.540/7/2002 tentang Pernyataan Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Bebas dari Penyakit *Brucellois*

Keputusan Menteri Pertanian No. 566/Kpts/PD/640/10/2004 tentang Pernyataan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Jawa Barat bebas dari penyakit Anjing Gila (Rabies)

Keputusan Menteri Kesehatan No. 300/ Menkes/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

Internet

Arif, Ahmad, 2020, Darurat Covid-19 di Indonesia, Jumlah Kematian Kembali Rekor, <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2020/12/25/darurat-covid-19-di-indonesia-jumlah-kematian-kembali-rekor/>. 19 Januari 2021.

Arnani, Mela. 2020. Update Korban Virus Corona: 2.770 Meninggal Dunia, 81.260 Terinfeksi, 30.006 Orang Sembuh. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/27/072000765/update-korban-virus-corona-2770-meninggal-dunia-81260-terinfeksi-30006?page=all>. 13 Maret 2021.

Cahyono, Ahmad Budi. 2020. Keppres 12/2020 Sebagai Dalil Force Majeure, Benarkah?. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9fe7fd1e34d/keppres-12-2020-sebagai-dalil-force-majeure-benarkah?page=2>. 1 Mei 2021.

Kurniadi, Rizal dan Islami, Dinda A. 2020. Dugaan Lain Munculnya Virus Corona, Kebocoran Laboratorium Wuhan?. <https://health.detik.com/video/200127024/dugaan-lain-munculnya-virus-corona-kebocoran-laboratorium-wuhan>. 23 Februari 2021.

Tesis

Adrita. 2010. Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Force Majeure dalam Energi Sales Contract antara PT PLN, PT Pertamina dan PT XYZ. *Tesis*. Tidak dipublikasikan. Depok: Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Epilia, Novia. 2010. Kontrak Internasional di dalam Menghadapi Mengantisipasi Krisis Ekonomi Analisis Terhadap Penerapan Klausula Force Majeure Untuk Memperkecil Dampak Negatif Krisis Ekonomi. *Tesis*. Tidak dipublikasikan. Depok: Program Magister Hukum Universitas Indonesia.

Widodo, Agus Suki. 2004. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor di Surakarta. *Tesis*. Tidak dipublikasikan. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Jurnal

Chairunisa, Agri. 2015. Force Majeure dalam Hukum Kontrak Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Veritas *Et Justitia*. Vol.1.1.2015

Milendra, Joel Timothy. 2021. Analisa Klausula Force Majeure Pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT. Sinergi Mega Karya Dengan PT Nasari Indonesia Dalam Situasi Pandemi Covid 19. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 17 Nomor 1 Februari 2021.

Rasuh, Daryl John. 2016. Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*. Vol. IV/No. 2/Feb/2016

Daftar Putusan

Putusan MA Reg. No.15 K./Sip./1957

Putusan MA No.409K/Sip/1983

Putusan No. 285PK/Pdt/2010